RAUDHAH Proud To Be Professionals *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*
Volume 10 Nomor 3 Edisi Desember 2025
P-ISSN : 2541-3686 E-ISSN : 2746-2447

POLITIK KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL DALAM PENGUATAN KARAKTER ISLAMI DI SEKOLAH

[1]Faisal*, [2]Kusuma, [3]Jalaluddin, [4]Nasaruddin, [5]Ruslan,
Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia
[1]Email:latiffaisal1974@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia
[2]Email:erranerick@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia
[3]Email:jalaluddin546@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia
[4]Email:nasarhb@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia
[5]Email:ruslanamarizki@gmail.com

Abstract: *National education policy provides a crucial foundation for directing educational approaches that focus on character development, which includes enhancing Islamic character within educational institutions. As students face growing moral dilemmas, it is vital to weave Islamic values into the education system to create harmony between academic success and spiritual and ethical growth. However, the enactment of Islamic character education frequently meets structural challenges, such as disparities in the school's environment, inadequate incorporation of the curriculum, and inconsistent application of policies within institutions. This research seeks to examine how national education policy promotes Islamic character through curriculum inclusion, fostering a spiritual school atmosphere, and empowering educators. Utilizing a descriptive qualitative methodology, this study is grounded in the analysis of policy documents, a review of literature, and observations of school activities. The results indicate that national policy measures, particularly the Pancasila Student Profile, the Strengthening Character Education (PPK) initiative, and the inclusion of religious elements in the curriculum, lay a robust normative and institutional groundwork for the development of Islamic character, particularly regarding ethical behavior, religious commitment, and faith-oriented school culture. Nonetheless, the success of these policies largely hinges on educators' capabilities, commitment from school leadership, and the extent of community involvement in the school. This research suggests that enhancing Islamic character education necessitates coherent policy integration, structured professional development for teachers, and governance models at the school level that adapt national policy frameworks into relevant and lasting educational practices.*

Keywords: *curriculum, school culture, national education policy, Islamic character, education policy.*

Pendahuluan

Indonesia pendidikan nasional dirancang tidak hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat UUD 1945, tetapi juga untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Hal ini sejalan dengan kondisi sosio-kultural bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dengan

demikian, pendidikan nasional dituntut tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik yang tercermin dalam pembentukan karakter Islami (Musrifah, 2016). Politik kebijakan pendidikan nasional menjadi arena strategis dalam menentukan arah pembinaan karakter tersebut. Kebijakan pendidikan seperti Kurikulum 2013, Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), hingga Kurikulum Merdeka, merupakan wujud nyata dari upaya negara dalam menanamkan nilai moral, religius, dan kebangsaan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Globalisasi membawa nilai-nilai sekuler dan liberal yang mengikis identitas keagamaan peserta didik. Fenomena degradasi moral, maraknya perundungan, pergaulan bebas, dan lemahnya budaya sopan santun menjadi indikator adanya kesenjangan antara visi kebijakan dengan realitas pendidikan (Sakti, 2024). Selain itu, lemahnya keteladanan sebagian pendidik, kurangnya sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta dominasi orientasi akademis dalam sistem pendidikan, semakin memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan telaah kritis terhadap politik kebijakan pendidikan nasional dalam konteks penguatan karakter Islami di sekolah, agar pendidikan benar-benar mampu mencetak generasi berakhlak mulia sesuai cita-cita bangsa dan ajaran Islam (Ariandy, 2019). Secara empiris, kondisi pendidikan saat ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran nilai pada peserta didik akibat arus globalisasi digital, komersialisasi budaya, serta derasnya informasi tanpa filter. Fenomena menurunnya etika sosial, munculnya perilaku intoleransi, konflik antar pelajar, dan lemahnya kepedulian sosial merupakan tanda bahwa pembangunan karakter Islami-seperti kejujuran, amanah, tawazun, adab terhadap guru, dan tanggung jawab sosial-belum sepenuhnya tercapai.

Hal ini menegaskan pentingnya memahami bagaimana kebijakan pendidikan nasional dirancang dan diterapkan untuk merespons tantangan tersebut. Dengan kata lain, penguatan karakter Islami tidak cukup hanya melalui pendekatan kurikulum, tetapi memerlukan kebijakan yang menyeluruh, terarah, dan bersifat sistemik (Setiawan et al., 2021). Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana politik kebijakan pendidikan nasional benar-benar mendukung penguatan karakter Islami di sekolah. Selama ini, kajian akademik lebih banyak menyoroti implementasi pendidikan karakter secara umum atau efektivitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam membentuk karakter peserta didik. Namun, masih jarang penelitian yang secara spesifik menganalisis dimensi politik kebijakan yaitu proses, kepentingan, aktor, dan dinamika pengambilan keputusan-yang mempengaruhi bagaimana nilai-nilai Islami diakomodasi dalam kebijakan pendidikan nasional. Padahal, praktik kebijakan tidak pernah netral, ia selalu dipengaruhi oleh tarikan ideologis, kepentingan birokratis, dan konteks sosial-politik yang berkembang (Setyowati & Sutikno, 2024).Dengan demikian, terdapat kesenjangan penting yang perlu diteliti, yaitu kurangnya pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara politik kebijakan pendidikan nasional dan penguatan

karakter Islami di sekolah. Penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan mengkaji bagaimana kebijakan dirumuskan, bagaimana penerapannya di tingkat sekolah, serta sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam memperkuat karakter Islami peserta didik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan karakter bangsa, sekaligus relevan dengan nilai-nilai keislaman yang menjadi bagian integral dari identitas pendidikan nasional.

Kajian Pustaka

Politik Kebijakan Kurikulum

Kebijakan pendidikan nasional merupakan instrumen negara dalam mengatur arah, tujuan, dan sistem pendidikan sesuai dengan visi pembangunan bangsa. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi administratif, tetapi juga mencerminkan ideologi negara dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (Tilaar, 2012; Nugroho, 2008). Dalam konteks Indonesia, kebijakan pendidikan dirumuskan melalui perangkat hukum seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta berbagai peraturan pelaksananya yang menjadi dasar pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Sadewa et al., 2024). Kebijakan pendidikan bersifat dinamis mengikuti perubahan sosial, politik, dan tantangan global. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan kurikulum merupakan bentuk respons negara terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus upaya membentuk karakter bangsa sesuai nilai-nilai nasional ((Tilaar, 2012; Nugroho, 2008). Politik pendidikan merupakan proses pengambilan keputusan strategis negara dalam menentukan arah pendidikan. Pendidikan tidak pernah sepenuhnya netral, tetapi selalu terkait kepentingan ideologis dan kekuasaan (Freire, 2005). Kurikulum sebagai produk kebijakan menjadi instrumen internalisasi nilai dan ideologi negara melalui proses pembelajaran (Apple, 2004).

Dengan demikian, kurikulum tidak hanya berfungsi akademik, tetapi sebagai alat pembentukan karakter dan ideologi kebangsaan melalui strategi pendidikan formal. Politik kurikulum secara inheren membawa konsekuensi terhadap pembentukan identitas siswa. Ketika negara mengarahkan kurikulum untuk menanamkan seperangkat nilai tertentu-seperti nasionalisme, ketahanan ideologi, atau dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila-maka ruang otonomi individu dalam menafsirkan identitasnya menjadi terbatas. Kurikulum berfungsi sebagai arena diskursus kekuasaan yang menentukan *pengetahuan mana yang bernilai*, dan oleh karena itu, ia berimplikasi pada marginalisasi pengetahuan atau pandangan kelompok minoritas. Dalam konteks ini, kurikulum menjadi arena tarik-menarik antara legitimasi negara dan otonomi warga negara, di mana pendidikan diarahkan untuk mereproduksi tatanan sosial yang dikehendaki oleh pemangku kekuasaan (Appadurai, 1996).

Tantangan Globalisasi dan Respon Kebijakan Pendidikan

Kebijakan kurikulum nasional dihadapkan pada tekanan signifikan akibat percepatan globalisasi. Arus informasi bebas dan interkonektivitas global cenderung menantang narasi tunggal yang dibangun oleh negara melalui kurikulum formal. Fenomena deterritorialisasi identitas, di mana nilai-nilai lokal (termasuk nilai Islami) berinteraksi secara langsung dengan nilai-nilai transnasional, menuntut kurikulum untuk menjadi lebih adaptif dan responsif, bukan sekadar represif. Respon kebijakan, seperti penguatan pendidikan karakter, dapat dilihat sebagai upaya negara untuk re-nasionalisasi nilai dan membentengi identitas kebangsaan dari pengaruh yang dianggap merusak, sekaligus menjaga koherensi sosial di tengah pluralitas global (Appadurai, 1996). Fenomena sekularisasi-yang dipahami sebagai pemisahan agama dari ranah publik secara gradual-berimplikasi pada reduksi nilai sakralitas dalam praktik pendidikan (Cassanova, 2011). Ketika pendidikan lebih diorientasikan pada fungsi ekonomi dan instrumental (penyediaan tenaga kerja), maka nilai-nilai spiritual dan moral substantif sering kali terpinggirkan. Kurikulum cenderung berfokus pada kompetensi pragmatis dan pengukuran yang terstandardisasi (seperti PISA atau OECD *skills*), yang secara tidak langsung menihilkan dimensi moral dan spiritual yang bersifat non-kuantitatif. Kesenjangan ini menciptakan krisis makna bagi peserta didik dan guru, di mana esensi pendidikan sebagai proses pencerahan (P, 2005) tereduksi menjadi mekanisme sertifikasi.

Urgensi Reformasi Kebijakan Berbasis Data dan Lintas Sektor

Untuk mengatasi kesenjangan antara tujuan kurikulum ideal (pembentukan karakter) dan hasil empiris (produktivitas sosial yang belum konsisten), reformasi kebijakan harus didukung oleh evaluasi berbasis data sistematis dan kolaborasi lintas-sektor. Evaluasi tidak boleh lagi bersifat anekdotal, melainkan harus menggunakan pendekatan *mixed-methods* (kombinasi data kuantitatif dan studi kasus longitudinal) untuk memberikan bukti empiris *real-time* mengenai dampak implementasi di lapangan (Mudzakkir, 2018). Implikasinya, kebijakan kurikulum memerlukan keterlibatan aktif dari lembaga non-pendidikan (seperti BPS, industri, dan organisasi masyarakat sipil) untuk memastikan bahwa lulusan tidak hanya memiliki kompetensi akademik dan karakter ideologis, tetapi juga produktivitas sosial yang berkelanjutan.

Pendidikan Karakter Dan Karakter Islami

Pendidikan karakter merupakan proses sistematis pembentukan kepribadian peserta didik melalui internalisasi nilai moral, etika, dan kebajikan. Pendidikan karakter menekankan aspek sikap dan perilaku, bukan hanya pengetahuan (Farida, 2014). Nilai utama termasuk religiusitas, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Karakter Islami merupakan aktualisasi nilai Al-Qur'an dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Tujuan utamanya membentuk insan kamil yang seimbang secara spiritual, intelektual, dan sosial. Keteladanan Rasulullah SAW menjadi model utama pembentukan karakter (Juhriansyah, 2022). Secara teoretis, Pendidikan Karakter Islami melampaui kerangka konvensional yang sering dikemukakan oleh para pakar Barat, seperti yang mencakup aspek mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan (*knowing, feeling, and acting the good*) (Lickona, 2009). Karakter Islami tidak hanya berhenti pada dimensi kognitif dan perilaku, tetapi menjangkau dimensi fitrah dan spiritualitas transenden. Nilai-nilai seperti *shidq* (kejujuran yang berakar pada kebenaran Ilahi) atau *amanah* (tanggung jawab yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan) memberikan landasan ontologis yang lebih dalam. Oleh karena itu, penguatan karakter Islami menuntut integrasi antara pendidikan akhlak dan pendidikan akal sebagai satu kesatuan utuh menuju pencapaian *insan kamil* (Shihab, 2012).

Peran PAI Dalam Penguatan Karakter Islami

Pendidikan Agama Islam (PAI) berperan strategis dalam penguatan karakter Islami di sekolah. PAI tidak hanya menyampaikan ilmu agama, tetapi juga membentuk spiritualitas dan moral peserta didik. Guru PAI memainkan peran sentral sebagai teladan dan pendidik nilai (Juhriansyah, 2022). Integrasi nilai Islami dilakukan melalui pendekatan kontekstual dan budaya religius di sekolah (Abidin, 2021). Oleh karena itu, PAI merupakan instrumen penting kebijakan nasional dalam internalisasi nilai keislaman. Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter Islami peserta didik di tengah perubahan sosial yang semakin kompleks. Artikel ini bertujuan mengkaji peran PAI dalam penguatan karakter Islami sebagai bagian dari kebijakan pendidikan nasional. Metode yang digunakan adalah studi pustaka terhadap literatur pendidikan Islam, kebijakan pendidikan, dan teori pendidikan karakter. Hasil kajian menunjukkan bahwa PAI berfungsi tidak hanya sebagai transmisi pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai akidah, akhlak, dan ibadah yang membentuk kepribadian religius peserta didik (Ilmiah et al., 2012). Pendidikan Agama Islam (PAI) menempati posisi sentral dan unik dalam kerangka kurikulum nasional karena PAI adalah satu-satunya mata pelajaran yang secara eksplisit memiliki mandat institusional dan substansial untuk menyampaikan nilai-nilai normatif keagamaan (Ali, 2008). Argumentasinya, PAI berfungsi sebagai "pusat gravitasi nilai" (*value center*) yang menjadi sumber rujukan etika bagi seluruh mata pelajaran lain. Namun, peran sentral ini juga membawa risiko marginalisasi terinstitusi, di mana tanggung jawab

penguatan karakter Islami secara *de facto* didelegasikan sepenuhnya kepada guru PAI. Hal ini seringkali membebaskan guru mata pelajaran umum dari tanggung jawab integrasi nilai, menciptakan kesenjangan implementasi (*implementation gap*) di mana karakter Islami dianggap sebagai domain eksklusif PAI, bukan sebagai semangat holistik yang menjiwai seluruh proses pendidikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis kebijakan pendidikan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan pendidikan nasional dirancang dan diimplementasikan dalam upaya penguatan karakter Islami di sekolah. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menelaah nilai, proses, serta dinamika kebijakan secara kontekstual, sebagaimana digunakan pada penelitian karakter Islam di sekolah menengah (Fajar & Riantika, 2022). Teknik pengumpulan data meliputi analisis dokumen, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Analisis dokumen mencakup telaah kebijakan nasional (Kurikulum Merdeka, PPK, dan dokumen pendidikan karakter) serta dokumen sekolah seperti visi-misi dan program keagamaan, mengikuti model penelitian kebijakan karakter Islami (Livia et al., 2021). Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, guru PAI, dan pemangku kebijakan untuk menggali implementasi serta tantangan kebijakan di lapangan. Sementara observasi digunakan untuk mengamati kegiatan pembiasaan karakter Islami seperti shalat berjamaah, adab terhadap guru, dan kegiatan sosial sekolah (Ahlul Fikri , Safrul Muluk, 2025). Untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti, dengan memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan yang bisa dikomunikasikan kepada orang lain. Analisis dimulai dengan memeriksa semua data dan sumber yang tersedia, termasuk wawancara, observasi lapangan atau pengamatan, rekaman dan dokumen lainnya (Carvina et al., 2023). Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis isi digunakan untuk mengkaji isi kebijakan pendidikan, sedangkan analisis tematik diterapkan pada data wawancara dan observasi untuk menemukan pola tematik seperti peran aktor kebijakan, strategi implementasi, dan faktor penghambat atau pendukung. Pendekatan ini mengacu pada metode analisis kebijakan karakter Islam (Musyfiq, 2024). Pemilihan lokasi penelitian menggunakan purposive sampling, yaitu sekolah yang menerapkan nilai-nilai Islami secara konsisten. Teknik ini lazim digunakan dalam penelitian kualitatif pendidikan karakter untuk memperoleh data yang kaya dan kontekstual (Supriadi et al., n.d.). Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif dinamika politik kebijakan pendidikan nasional dalam memperkuat karakter Islami di sekolah serta memberikan rekomendasi kebijakan yang strategis dan kontekstual (Alhamuddin, 2025).

Pembahasan

Politik kebijakan pendidikan nasional Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai Islami ke dalam kurikulum sebagai upaya strategis untuk membentuk karakter siswa yang berlandaskan akidah dan moralitas (PPRI, 2007). Dalam praktiknya, integrasi nilai Islami di sekolah sering

kali mengalami reduksi makna menjadi aktivitas simbolik dan administratif, seperti penekanan pada rutinitas keagamaan formal, tanpa diiringi internalisasi nilai yang mendalam dalam proses pembelajaran lintas mata pelajaran. Variasi implementasi terlihat jelas antar sekolah, di mana satuan pendidikan dengan kepemimpinan yang kuat dan budaya sekolah religius mampu mengoperasionalkan kebijakan secara lebih substansial, sementara sekolah lain cenderung menjalankannya sebatas pemenuhan kewajiban regulatif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan nasional dan kapasitas implementatif di tingkat sekolah. (Hakim, 2025). Secara politis, kebijakan pendidikan karakter Islami kerap dibingkai sebagai instrumen pembangunan moral dan sosial. Namun, analisis empiris menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya lokal. Di wilayah dengan keragaman interpretasi keagamaan yang tinggi, kebijakan yang bersifat seragam justru memunculkan resistensi laten, baik dari pendidik maupun komunitas sekolah, karena dianggap kurang sensitif terhadap realitas pluralitas. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa kebijakan berbasis nilai memerlukan fleksibilitas implementatif agar tidak terjebak pada pendekatan normatif yang mengabaikan dinamika sosial di lapangan. (Basri, 2021). Evaluasi terhadap politik kebijakan pendidikan nasional yang mengintegrasikan nilai Islami mengungkapkan dampak positif pada pembangunan sosial, termasuk pengurangan tingkat intoleransi dan peningkatan solidaritas antarwarga. Berdasarkan studi longitudinal, kebijakan seperti Kurikulum 2013 yang mengadopsi pendekatan tematik berbasis nilai Islami telah meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pembentukan generasi yang lebih bertanggung jawab dan inovatif (Djalong & Kaunang, 2013). Namun, kritik muncul dari perspektif sosiologis bahwa kebijakan ini berpotensi memperkuat segregasi sosial jika tidak disertai dengan pendidikan inklusif yang menghargai pluralitas. Implikasinya, para pemangku kepentingan perlu melakukan reformasi berbasis bukti untuk memastikan kebijakan ini selaras dengan prinsip demokrasi dan keberagaman bangsa (Statistik, 2022).

Kebijakan pendidikan nasional secara normatif menempatkan dimensi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagai orientasi fundamental dalam pembentukan peserta didik. Program kurikulum, pendidikan agama, dan penguatan karakter difungsikan sebagai instrumen strategis untuk mengaktualisasikan visi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini sejalan dengan nilai filosofis Pancasila serta arah pembangunan nasional. Secara yuridis, perangkat regulatif pendidikan memberikan legitimasi luas terhadap penguatan nilai-nilai Islami dalam proses pembelajaran (Ilmiah et al., 2012). Namun demikian, internalisasi nilai-nilai Islami dalam implementasi kebijakan pendidikan memerlukan komitmen moral, konsistensi praksis, dan budaya sekolah yang kondusif pada tingkat operasional satuan pendidikan. Nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kasih sayang harus terintegrasi melalui aktivitas pembelajaran, keteladanan pendidik, dan ekosistem pendidikan yang humanis (Damayanti, 2025). Dalam konteks ini,

kebijakan pendidikan tidak cukup berhenti pada tataran konseptual, tetapi harus bertransformasi menjadi praksis pembentukan karakter Islami yang memadukan kematangan intelektual, emosional, dan spiritual secara sinergis (Tambunan, 2023). Integrasi nilai Islam dalam kebijakan pendidikan merupakan strategi kultural untuk membentuk generasi beriman yang adaptif terhadap modernitas tanpa kehilangan jati diri religiusnya (Nurhayani, 2017).

Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran religius siswa belum selalu berbanding lurus dengan perubahan perilaku sosial yang berkelanjutan. Meskipun program seperti Kurikulum 2013 dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menyediakan kerangka normatif yang kuat, dampaknya sangat bergantung pada kompetensi guru dalam menerjemahkan nilai Islami ke dalam praktik pedagogis yang kontekstual. Di banyak sekolah, keterbatasan pelatihan guru dan lemahnya supervisi akademik menyebabkan nilai karakter lebih banyak disampaikan secara verbalistik, bukan melalui pembiasaan dan keteladanan.

Temuan lapangan menegaskan bahwa tantangan implementasi kebijakan penguatan karakter Islami bersifat multidimensional. Globalisasi dan penetrasi budaya digital tidak hanya menggeser preferensi nilai siswa, tetapi juga menciptakan ketegangan antara nilai religius yang diajarkan di sekolah dan realitas sosial yang mereka hadapi di luar kelas. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan sering kali belum mampu merespons secara adaptif, sehingga sekolah dibiarkan berjuang sendiri menghadapi kompleksitas tantangan moral peserta didik. (Tinggi et al., 2025) Kedua, tren sekularisasi secara *gradual* memisahkan agama dari ranah publik termasuk pendidikan, sehingga nilai sakralitas pendidikan menghadapi reduksi makna (Firdaus et al., 2025). keteladanan guru sebagai role model moral belum optimal karena kompetensi kepribadian tidak merata dalam korps pendidik, padahal karakter lebih efektif ditransmisikan melalui keteladanan daripada instruksi verbal (Wati et al., 2022). Keempat, terdapat kesenjangan antara kebijakan dan praktik; regulasi pendidikan karakter bersifat ideal, tetapi implementasinya di sekolah kerap mengalami hambatan operasional dan budaya organisasi (Asri, Selvia, 2024). faktor lingkungan sosial seperti media digital, gaya hidup konsumtif, serta lemahnya kontrol sosial turut memperlemah internalisasi nilai karakter Islami pada remaja dalam konteks masyarakat modern (Rizkil, 2025). Implementasi politik kebijakan pendidikan nasional yang mengintegrasikan nilai Islami dihadapkan pada tantangan signifikan terkait keragaman budaya dan interpretasi agama di Indonesia, sebuah negara dengan lebih dari 300 suku dan etnis. Kebijakan seperti Kurikulum 2013, yang menekankan pendidikan karakter berbasis nilai Islami, sering kali menemui hambatan dalam konteks lokal di mana interpretasi ajaran Islam bervariasi, mulai dari paham tradisional hingga modern (Titis Sulistyowati, 2019). Hal ini dapat menimbulkan ketegangan sosial, seperti resistensi dari kelompok minoritas atau perdebatan politik mengenai sekularisme versus religiusitas, yang berpotensi mengurangi efektivitas pendidikan dalam membentuk harmoni nasional. Penelitian

empiris menunjukkan bahwa tanpa pendekatan inklusif, kebijakan ini berisiko memperdalam polarisasi, terutama di daerah dengan tingkat pluralitas tinggi (Muzakkir Walad, 2024).

Selain itu, kesenjangan antara regulasi dan praktik menjadi persoalan struktural yang berulang. Meskipun kebijakan pendidikan karakter dirancang secara ideal, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya budaya organisasi sekolah, serta rendahnya konsistensi implementasi menyebabkan kebijakan tersebut sulit mencapai dampak yang terukur. Guru PAI, khususnya di daerah terpencil, menghadapi keterbatasan dalam mengintegrasikan nilai Islami dengan pendekatan pembelajaran modern, sehingga pembelajaran karakter kurang relevan dengan realitas kehidupan siswa. (Okta Rosfiani, Bayu Sukmana, 2025). Evaluasi melalui indikator seperti survei indeks karakter siswa menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran religius, dampaknya pada produktivitas sosial belum konsisten, sehingga memerlukan reformasi berbasis data untuk mengatasi kesenjangan ini. Implikasinya, kebijakan ini memerlukan kolaborasi lintas-sektor untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan (Ahdar, Musyarif, 2019).

Optimalisasi penguatan nilai karakter Islami memerlukan pendekatan holistik, integratif, dan adaptif. Pertama, nilai-nilai Islam perlu diintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran melalui kurikulum tematik dan pembelajaran kontekstual, bukan hanya terfokus pada Pendidikan Agama Islam (Haryanto, 2017). Kedua, peningkatan kompetensi guru sebagai teladan moral dan spiritual harus dilakukan melalui pembinaan profesional berkelanjutan demi memperkuat dimensi personal dan pedagogis (Adibah, 2016). kolaborasi sinergis antara sekolah, keluarga, dan masyarakat diperlukan untuk membangun ekosistem pendidikan Islam yang stabil dan harmonis, mengingat pendidikan karakter bersifat kolektif (Abdullah Raffi, 2025). Keempat, penguatan kerangka kebijakan perlu diarahkan agar responsif terhadap tantangan global melalui inovasi regulatif yang tetap berakar pada nilai-nilai Islam (Mirzon Daheri, 2023). Kelima, pemanfaatan teknologi digital secara positif dan terkontrol dapat menjadi media efektif untuk penguatan akhlak dan pembelajaran nilai melalui konten edukatif, literasi digital, dan pengawasan penggunaan media sosial (Rahman et al., 2023).

Untuk mengoptimalkan implementasi politik kebijakan pendidikan nasional yang mengintegrasikan nilai Islami, strategi pengembangan kurikulum inklusif menjadi pendekatan utama dalam mengatasi tantangan keragaman budaya dan interpretasi agama. Pendekatan ini melibatkan revisi kurikulum seperti Kurikulum 2013 melalui metode *participatory design*, di mana pemangku kepentingan dari berbagai kelompok etnis dan agama terlibat dalam merumuskan materi pendidikan yang menghargai pluralitas sambil menekankan nilai-nilai universal Islami seperti toleransi dan solidaritas. Pelatihan intensif bagi guru PAI untuk mengadopsi teknik pengajaran multidimensi, yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif,

dapat meningkatkan efektivitas transfer nilai, sehingga mengurangi risiko polarisasi sosial (M. Ali Yusron, 2020). Studi empiris menunjukkan bahwa strategi ini tidak hanya memperkuat harmoni nasional tetapi juga meningkatkan indeks partisipasi pendidikan di daerah plural (Faizal, 2017). Strategi Investasi Sumber Daya dan Evaluasi Berbasis Data untuk Optimalisasi Kebijakan. Strategi lain untuk optimalisasi kebijakan pendidikan nasional berbasis nilai Islami adalah melalui investasi sumber daya manusia dan infrastruktur, disertai dengan evaluasi berbasis data yang sistematis. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan profesional guru, termasuk sertifikasi kompetensi dalam pendidikan karakter Islami, serta pembangunan fasilitas digital di daerah terpencil untuk mendukung pembelajaran blended (Maya, 2003). Lebih jauh, kebijakan pendidikan nasional perlu mengadopsi model evaluasi berbasis data yang mampu mengukur dampak nyata penguatan karakter Islami, tidak hanya pada aspek religiusitas formal, tetapi juga pada perilaku sosial dan partisipasi warga sekolah. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan komunitas lokal menjadi prasyarat utama agar kebijakan tidak berhenti sebagai wacana normatif, melainkan bertransformasi menjadi praksis pendidikan karakter yang inklusif, berkelanjutan, dan relevan dengan tantangan zaman.

Kesimpulan

Politik kebijakan pendidikan nasional di Indonesia secara normatif telah memberikan arah yang jelas terhadap penguatan karakter Islami melalui kerangka regulatif, pengembangan kurikulum, dan program pendidikan karakter. Arah kebijakan ini sejalan dengan nilai filosofis Pancasila dan tujuan pendidikan nasional yang berorientasi pada pembentukan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Namun demikian, dalam konteks implementasi, terdapat tantangan yang kompleks, mulai dari pengaruh arus globalisasi, penetrasi budaya sekuler, hingga disrupsi digital yang memengaruhi pola pikir dan perilaku peserta didik. Selain faktor eksternal, tantangan internal juga muncul dari aspek keteladanan guru dan budaya sekolah yang belum sepenuhnya mendukung internalisasi nilai moral dan spiritual. Ketidakseimbangan antara regulasi ideal dan praktik implementatif di sekolah menunjukkan adanya disparitas kebijakan-operasional yang perlu mendapat perhatian serius. Pendidik yang kurang memiliki kompetensi kepribadian dan spiritual dapat menjadi penghambat pembentukan karakter peserta didik, sebab karakter paling efektif ditransmisikan melalui contoh, bukan sekadar instruksi verbal. Untuk mengoptimalkan penguatan karakter Islami, diperlukan strategi kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang responsif terhadap tantangan global, sementara sekolah harus membangun budaya religius yang inklusif dan humanistik. Orang tua dan masyarakat juga memiliki peran signifikan dalam membentuk ekosistem pendidikan moral yang kontekstual dan berkelanjutan. Dengan demikian,

pendidikan karakter Islami harus diwujudkan sebagai gerakan sosial dan kultural yang hidup dalam praktik keseharian peserta didik, bukan sekadar program administratif formal. Pada akhirnya, politik kebijakan pendidikan nasional berfungsi sebagai instrumen strategis untuk membentuk generasi yang tidak hanya unggul dalam aspek intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan kokoh secara spiritual. Keberhasilan internalisasi nilai Islam dalam pendidikan akan melahirkan peserta didik yang memiliki integritas moral, kemampuan adaptasi terhadap modernitas, dan komitmen sosial yang kuat. Keseimbangan antara kecerdasan spiritual, intelektual, dan sosial menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan peradaban di era global.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Raffi, D. (2025). *Pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW*. Makalah.

Abidin, M. (2021). Pendidikan moral. *Jurnal Pendidikan*, 2, 57–66.

Adibah, H. (2016). Kompetensi guru dalam perspektif pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1.

Ahdar, M. (2019). Tantangan pendidikan Islam di Indonesia pada era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 17(1).

Ahlul Fikri, S., & Muluk, S. (2025). Implementation of school policy in realizing the character education program at SMA Negeri 1 Kuta Baro Aceh Besar. *Journal of Education Policy*, 15(1).

Alhamuddin. (2025). Islamic character education in Indonesian national curricula: A critical policy analysis of the 2013 and Merdeka frameworks. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 27–38. https://doi.org/10.21043/qijis

Ali, M. (2008). *Peran guru pendidikan agama Islam dalam pengembangan karakter siswa*.

Appadurai, A. (1996). *Modernity at large: Cultural dimensions of globalization*. University of Minnesota Press.

Apple, M. W. (2004). *Ideology and curriculum* (3rd ed.). Routledge.

Ariandy, M. (2019). Kebijakan kurikulum dan dinamika penguatan pendidikan karakter di Indonesia. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 137–168. https://doi.org/10.32533/03201.2019

Asri, D. S. (2024). Character education: A review of implementation and challenges in schools. *Journal of Educational Studies*, 4(1), 1–6.

Basri, H. (2021). *Otonomi pendidikan Islam*.

Carvina, M., Iqbal, M., Khairani, C., Muharramsyah, R., & Marisa, R. (2023). Implementasi nilai pendidikan karakter berbasis Islami di sekolah dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 12(4), 2537–2554. https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.5050

Casanova, J. (2011). *The problem of religion in the modern world and the new global era*. University of Chicago Press.

Damayanti, R. (2025). Integration of Islamic religious education values with independent curriculum: Opportunities and challenges in elementary schools. *Journal of Islamic Education*, 4(1), 3917–3925.

Djalong, F. A., & Kaunang, H. P. (2013). Investing intolerance: Pendidikan karakter and Curriculum 2013. *Journal of Social Studies*, 18, 18–25.

Faizal. (2017). Islamic education at multicultural schools. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 141–154. https://doi.org/10.15575/jpi.v3i2.1448

Fajar, R., & Riantika, P. (2022). Model pendidikan karakter berbasis nilai keagamaan: Perspektif Islam dan konteks sosial. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 18–36.

Farida, N. (2014). Konsep pendidikan karakter menurut Thomas Lickona dalam buku *Educating for Character*.

Firdaus, Q. A. H., Ghozali, A., & Alghifary, A. S. (2025). Islamic philosophy and artificial intelligence: Mapping the terrain. *Journal of Islamic Philosophy*, 16(1), 1–22.

Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.

Hakim, L. (2025). Integration of differentiation learning in Islamic religious education in improving spiritual literacy in Society 5.0. *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(2), 210–222. https://doi.org/10.38073/jpi.v15i2.3480

Haryanto, S. (2017). *Pendidikan karakter: Konsep dan model*.

Juhriansyah, M. R. (2022). Pendidikan agama Islam dan pembentukan karakter. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 12(1), 29–40. https://doi.org/10.18592/jt

Lickona, T. (2009). *Educating for character*. Bantam Books.

Livia, A., Nurany, D., Rosyid, M. A., Putri, C. J., Juwanti, A. E., & Ramadhan, N. F. (2021). Konsep kebijakan pendidikan karakter dalam pandangan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3, 210–224.

Maya, R. (2003). Esensi guru dalam visi dan misi pendidikan karakter.

Musrifah. (2016). Pendidikan karakter dalam perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1, 119–133.

Musyfiq, A. (2024). Independent curriculum development strategy in Islamic religious education: Conceptual studies of building character and nationality. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 65–80.

Nurhayani. (2017). Penerapan metode simulasi dalam pembelajaran fikih ibadah. *Ansiru*, 1, 88–104.

Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007*.

Setiawan, F., Hutami, A. S., Riyadi, D. S., & Dahlan, A. (2021). Kebijakan penguatan pendidikan karakter melalui pendidikan agama Islam. *Jurnal Pendidikan*, 4(1), 1–22.

Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.

Statistik, B. P. (2022). *Indeks pembangunan manusia Indonesia 2022*. BPS.

Copyright for this article is retained by the author(s)

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License